

**ASPEK HUKUM KEWENANGAN PT. PERHUTANI TERKAIT
PENYITAAN TANAH PERKEBUNAN HGU BERDAMPAK
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Analisis Putusan Nomor: 3044/K/Pdt/2019)**

YAYAN SEPTIADI

ABSTRACT

In this research, the author discusses the legal aspects of PT authority. Perhutani Regarding Confiscation of HGU Plantation Land which has the Impact of Unlawful Acts, as well as to understand and analyze the settlement process and its results, in cases of confiscation carried out on plantation land which legally has a certificate of cultivation rights (HGU) as regulated in the UUPA in Government Regulations Number 40 of 1996 concerning Business Use Rights and also completeness of other permits owned by PT Bersama Sejahtera Sakti. The method used in this research is a normative juridical method which comes from legal material sources by examining statutory regulations related to this research. The conclusion obtained in this discussion is that with the decision of the supreme court which has canceled the decision of the court of first instance and the court of appeal there has been a legal unlawful act which has resulted in material and immaterial losses to PT. Bersama Sejahtera Sakti due to confiscation by force (dwang middelen) which was not based on approval or permission from the Chairman of the District Court and a criminal act committed by PT. Together with Prosperous Sakti.

Keywords: Cultivation Rights, Composition, Unlawful Actions

**ASPEK HUKUM KEWENANGAN PT. PERHUTANI TERKAIT
PENYITAAN TANAH PERKEBUNAN HGU BERDAMPAK
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Analisis Putusan Nomor: 3044/K/Pdt/2019)**

YAYAN SEPTIADI

ABSTRAK

Dalam Penelitian ini, penulis membahas mengenai aspek hukum kewenangan PT. Perhutani Terkait Penyitaan Tanah Perkebunan HGU Berdampak Perbuatan Melawan Hukum, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penyelesaian beserta hasilnya, dalam kasus penyitaan yang dilakukan terhadap lahan perkebunan yang secara sah telah memiliki sertifikat hak guna usaha (HGU) sebagaimana yang diatur dalam UUPA pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 perihal Hak Guna Usaha dan juga memiliki kelengkapan perizinan-perizinan lainnya dimiliki oleh PT Bersama Sejahtera Sakti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dimana yang berasal dari sumber bahan hukum dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang didapat dalam pembahasan ini adalah dengan adanya putusan mahkamah agung yang telah membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding telah adanya secara sah perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kerugian materiil dan inmateriil pada PT. Bersama Sejahtera Sakti akibat terjadinya penyitaan dengan upaya paksa (*dwang middelen*) yang tidak atas dasar persetujuan maupun izin dari Ketua Pengadilan Negeri dengan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Bersama Sejahtera Sakti.

Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Penyitaan, Perbuatan Melawan Hukum